

TESIS

**Status Harta Kekayaan Badan Hukum Yang Didirikan Oleh Yayasan Yang Tidak
Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**STATUS HARTA KEKAYAAN BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN
OLEH YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

(Arnold Eka Putra, 192012302, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 110 Halaman, Tahun 2019)

ABSTRAK

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Maksud didirikan suatu Yayasan adalah untuk kegiatan Sosial yang bertujuan tidak mencari keuntungan pribadi (*Private Profite*).

Rumusan masalah sebagaimana status harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, langkah hukum apa sajakah yang ditempuh oleh Yayasan Pendidikan PGRI untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR agar tidak dibubarkan, dan bagaimana penyelesaian sengketa tentang status hukum harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Singkronisasi Hukum artinya permasalahan yang dingkat, dibahas, dan diuraikan dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematika hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harta kekayaan Badan Hukum yang didirikan oleh Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, sehingga ada langkah hukum yang diambil oleh Pendiri Yayasan lama (Yayasan Pendidikan PGRI) untuk mendirikan Yayasan baru (Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat) demi menyelamatkan Badan Usahanya (SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR) agar pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga langkah yang diambil oleh Pendiri Yayasan lama tersebut menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Akibat permasalahan yang timbul, terciptanya Gugatan Perdata dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat didirikannya Yayasan baru tersebut oleh Pendiri Yayasan lama, dan hasil Putusan Pengadilan atas sengketa Perdata tersebut justru menimbulkan permasalahan hukum baru dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang telah ada.

Kata kunci : Yayasan, Harta Kekayaan, Putusan Pengadilan

**STATUS OF ASSETS BELONGING TO THE LEGAL ENTITY
ESTABLISHED BY FOUNDATIONS THAT DO NOT MEET THE
REQUIREMENTS STATED IN THE REGULATION NUMBER 16 OF
2001 JUNCTO THE REGULATION NUMBER 28 OF 2004 CONCERNING
FOUNDATIONS**

(Arnold Eka Putra, 192012302, Master of Notary, Faculty of Law Andalas
University, 110 pages, 2019)

ABSTRACT

A foundation is a legal entity consisting of assets that are separated and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields, which do not have members. The purpose of establishing a Foundation is for social activities that is not aimed at seeking for personal gain (*Private Profit*).

The formulation of the problem is the status of Legal Entity assets established by Foundations that do not meet the requirements stated in the regulation number 16 of 2001 Juncto the regulation number 28 of 2004 Concerning Foundations, legal steps have been taken by the PGRI Education Foundation to save its Business Entity in the form of SMA PGRI 1 PADANG and STKIP PGRI SUMBAR in order not to be dissolved, and how to resolve the dispute regarding the legal status of the assets of the PGRI Education Foundation based on the Decision on Civil Case Number 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg at the Padang District Court.

Research used in this study is research Normative Law and Legal Synchronization, meaning that issues are raised, discussed, and described by looking at the conformity or alignment of laws and regulations vertically based on positive legal systematics, namely between higher statutory regulations with lower statutory regulations.

The results of the research show that the assets of legal entities established by foundations that do not meet the requirements stated in the regulation number 16 of 2001 Juncto the regulation number 28 of 2004 Concerning Foundations, so that there were legal steps taken by the Founder of the old Foundation (PGRI Education Foundation) to establish a new Foundation (the Foundation Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat) in order to save his Business Entities (SMA PGRI 1 PADANG and STKIP PGRI SUMBAR) so that education continues as it should, so that steps taken by the Founder of the old Foundation caused legal problems in the future. As a result of the problems that arose, the creation of Civil Lawsuits from parties who felt disadvantaged as a result of the establishment of the new Foundation by the Founder of the old Foundation, and the results of the Court's Decision on Civil disputes actually created new legal issues and did not resolve existing legal problems.

Keywords : Foundations, Assets, Judgement